

**PERAN OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS (OHCHR) MENYELAMARKAN KEKERASAN ETNIS MUSLIM ROHINGYA DI MYANMAR (2012-2014)**

**Oleh: Rika Rizki**

**Nim: 1101136668**

**Pembimbing: Faisyal Rani S.IP, MA, Bibliografi: 6 Buku, 3 Jurnal, 1 Skripsi, 39 Website**

**ABSTRACT**

*This research explains the role of the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in the ethnic conflict that occurred in Rakhine State, Myanmar, between Arakanese Buddhist and Rohingya Muslims in mid 2012. The violence against the Rohingya Muslim minority has a very long felt. They were not granted citizenship and be oppressed minorities. They also got discrimination in various fields, economic, political and social.*

*The research applies qualitative methods, and case study in this research the data collected through library research, literature studies, official documents, academic journal, and mass media.*

*Therefore, as a form of international concern as the OHCHR human rights bodies providing assistance to the Rohingya Muslim minorities. One of them by sending special rappourter to the country of myanmar for communicate with the government Myanmar.*

**Keywords:** *Human Rights, Citizenship, Ethnic Minorities, OHCHR, Government*

**PENDAHULUAN**

Di Era Globalisasi kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia selalu mendapat perhatian serius dari berbagai belahan dunia. Terlebih kita melihat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi terhadap Etnis minoritas Muslim Rohingya di Myanmar merupakan salah satu Negara tetangga kita di Asia Tenggara.

Myanmar memiliki sejarah yang panjang dan rumit, Burma sebelum berganti nama menjadi Myanmar yang merupakan bekas jajahan Inggris ini adalah bagian dari kawasan Asia Tenggara. Namun nama Negara Burma tidak lagi terdapat dalam daftar negara-negara Asia Tenggara. Terdapat nama lain yaitu

Myanmar. Perubahan nama Negara dari Burma menjadi Myanmar dilakukan oleh pemerintahan junta militer dibawah kepemimpinan Jenderal Saw Maung pada 8 Juni 1989. Perubahan nama menjadi Myanmar ditujukan untuk mengubah kesan rasial yang melekat pada nama Burma. Berdasarkan data yang diperoleh dari CIA, 68 % dari total penduduk Negara ini adalah etnis *Burmese*, yang berarti nama Burma hanya mewakili etnis atau suku bangsa *Burmese* dan memiliki kesan bahwa Negara ini adalah milik etnis *Burmese*, sedangkan Burma merupakan sebuah Negara yang multi etnis. Selain etnis mayoritas *Burmese*, terdapat juga berbagai etnis minoritas yang lain seperti *Shan, Kareen, Rakhine,*

*Chinese, Indian, Mon* dan etnis lainnya yang menempati luas wilayah yang cukup besar, yaitu 40% yang letaknya tersebar di wilayah pinggir atau perbatasan Negara Myanmar. Oleh sebab itu perubahan nama Negara tersebut bertujuan agar etnis non-*Burmese* memiliki rasa menjadi bagian dari negaranya.

Nama Negara baru menjadi Myanmar tersebut di ikuti dengan ibu kota yang baru yaitu Naypyidaw. Ibu kota Negara baru ini bukan perubahan nama dari Yangon menjadi Naypyidaw namun terjadi pemindahan lokasi ibu kota. Pemindahan ibu kota ini dilakukan oleh junta militer pada 7 November 2005 ke Naypyidaw yang memiliki arti “tempat tinggal para raja”. Beberapa alasan terkait dengan pemindahan ibu kota Negara Myanmar, ada sebuah alasan klasik, yaitu pemindahan tersebut dilakukan untuk mengikuti sebuah tradisi Myanmar pada masa dinasti yang gemar memindahkan ibu kota. Tentunya pemindahan ibu kota tersebut telah menghabiskan banyak biaya yang cukup besar dan berpengaruh terhadap anggaran belanja Negara.<sup>1</sup>

Untuk dapat sampai ke ibu kota yang baru menempuh perjalanan darat selama enam jam kearah utara dari Yangon. Naypyidaw dibangun dihamparan tanah yang sebelumnya kosong sehingga tidak sulit bagi pemerintah Myanmar untuk membuat bangunan luas dengan jarak rata-rata 100 meter lebih dari jalan raya. Ibu kota baru ini ditetapkan pada tahun 2006, namun keadaan di ibu kota yang baru ini terlihat sunyi, sangat jarang terlihat kendaraan yang melintasi

<sup>1</sup> Dinamika Politik dan Demokrasi Myanmar. <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/4s1hubunganinternasional/206613027/BAB%20II.pdf>. Diakses pada 10 November 2014

Naypyidaw seperti jalan-jalan utama di Beijing, ibu kota China yang terlihat lurus dan lebar dengan trotoar tertata rapi.<sup>2</sup>

Myanmar merupakan salah satu Negara berkembang dengan pemerintahan junta militer, yang berada dikawasan Asia Tenggara. Myanmar merdeka dari kolonialisme Inggris pada tahun 1948. Myanmar memiliki sumber daya alam yang kaya, seperti minyak, mineral-mineral serta batu berharga, namun Myanmar merupakan salah satu Negara dengan sumber pendapatan perkapita yang cukup rendah dibandingkan dengan Negara-negara Asia Tenggara lainnya. Namun walaupun merupakan Negara berkembang dengan pendapatan perkapita yang cukup rendah, Myanmar bukanlah Negara lemah karena Myanmar memiliki kekuatan militer yang sangat kuat dan merupakan kekuatan militer yang terkuat dan terbesar di Asia Tenggara.<sup>3</sup>

### **Pengungsi Rohingya**

Rohingya adalah salah satu etnis yang berasal dari Negara Myanmar. Myanmar secara resmi mengakui 135 kelompok etnis kabupaten, dikelompokkan menjadi 8 besar ras etnis nasional. Etnis Burma sebanyak 68 %, Shan 9%, Karen 7%, Rakhine 4%, China 3%, India 2%, Mon 2%, dan lainnya 5%.<sup>4</sup> Populasi

<sup>2</sup> Naypyitaw Antara News. Naypyitaw, Ibu Kota Myanmar yang senyap. <http://www.antaranews.com/berita/410553/naypyitaw-ibu-kota-myanmar-yang-senyap>. Diakses pada 11 November 2014

<sup>3</sup> [lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135851-T%2028013-Kajian%20mengenai-Pendahuluan.pdf](http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135851-T%2028013-Kajian%20mengenai-Pendahuluan.pdf). Diakses pada 10 November 2014

<sup>4</sup> CIA The World Factbook. Burma. <https://www.cia.gov/library/publications/the->

yang bukan Myanmar merupakan 32% dari total penduduk negara Myanmar.<sup>5</sup>

Penolakan pemerintah dan tidak menganggap muslim Rohingya sebagai warga negaranya, dan malah mengatakan bahwa muslim Rohingya merupakan imigran dari Bangladesh bias kita lihat dari sejarah dan gelombang pengungsi Bangladesh.

Pada abad ke 15 hingga 16 penguasa Rakhine Utara dan Bangladesh melakukan beberapa aktifitas kerjasama, mulai dari perdagangan, militer serta menyebarkan agama. Pada abad inilah terjadi arus migrasi umat islam dari Bangladesh ke Arakan. Kemudian ditahun 1784 raja Myanmar yakni Bodawpaya melakukan invasi dan mengambil alih kerajaan Rakhine Utara untuk menjadi Myanmar pusat. Karena peristiwa tersebut akhirnya Rohingya melarikan diri ke daerah Cox Bazar di Bangladesh. Para Rohingya yang kabur ke Bangladesh sebagian dari mereka tidak kembali ke Myanmar atau menetap di Bangladesh dan menjadi terintegrasi dengan masyarakat setempat. Pada tahun 1824, Inggris menjajah Myanmar untuk menggelar otonomi daerah. Sampai pada perang dunia II ada beberapa peristiwa pemberontakan yang terjadi. Pada masa pemerintahan Inggris, terdapat migrasi Bangladesh ke Myanmar, pemerintah Inggris mempertimbangkan hal tersebut. Namun migrasi yang terjadi selama periode tersebut dianggap ilegal oleh pemerintah Myanmar, dan itu adalah salah satu alasan mengapa mereka menolak kewarganegaraan Rohingya.<sup>6</sup>

Pada juni lalu kerusuhan mulai terjadi di sektarian Buddhis-Muslim. Akibatnya dua kelompok yang dulu bertetangga itu kini hidup dalam segregasi dan membuat puluhan ribu muslim Rohingya kini terpaksa tinggal di camp-camp pengungsi sementara. Menurut Myo Thant yang merupakan juru bicara Negara bagian Rakhine bahwa kekerasan terakhir telah menyebabkan setidaknya 20 orang tewas baik dari etnis Buddhis Rakhine maupun muslim Rohingya, akibat bentrokan yang terjadi sejak 21 Oktober lalu.<sup>7</sup>

Terdapat dugaan yang memperlihatkan kebijakan pemerintah Myanmar melakukan diskriminasi terhadap muslim Rohingya di Negara bagian Rakhine. Pemerintah Myanmar selama ini menganggap bahwa muslim Rohingya sebagai kelompok imigran asing, bukan sebagai warga Negara Myanmar. Warga Myanmar yang mayoritas Buddha juga selama ini menyiarkan kebencian terhadap muslim Rohingya. Terdapat bukti dari 12 dokumen yang dianalisa sejak 1993 hingga 2013 dan mendapatkan bukti bahwa pemerintah membatasi kebebasan dasar dari muslim Rohingya di Negara bagian Rakhine tersebut. Pembatasan tersebut terjadi dalam bentuk pergeran, kelahiran, perbaikan rumah dan pembangunan tempat ibadah. Muslim Rohingya di Rakhine juga dilarang bepergian keluar kota tanpa izin. Dalam laporan tersebut juga disebutkan, bahwa muslim Rohingya yang menikah dilarang memiliki lebih dari dua anak. Dan juga jika ingin menikah harus mengajukan izin terlebih dahulu.<sup>8</sup>

---

world-factbook/geos/bm.html (tanggal 14/02/2013)

<sup>5</sup> Op Cit. Merry Iklima

<sup>6</sup> Op Chit. Skripsi Merry Iklima

---

<sup>7</sup> <http://www.dw.de/puluhan-tewas-pasca-kerusuhan-terbaru-rakhine-rohingya/a-16330343>. Diakses pada 25 Oktober 2014

<sup>8</sup> Pemerintah Myanmar terbukti diskriminatif terhadap muslim rohingya. Merdeka.com

Laporan PBB juga menyebutkan bahwa lebih dari 22.000 orang yang sebagian besar masyarakat Muslim terlantar di Myanmar barat setelah gelombang kekerasan dan pembakaran terbaru yang menewaskan puluhan orang. Seluruh permukiman dibakar dalam kerusuhan di Negara bagian Rakhine yang merusak reformasi Negara itu dan menghambat usaha pertolongan di daerah tersebut, tempat 75.000 orang mengungsi di kamp penuh sesak setelah bentrokan yang terjadi antara Buddha dan Muslim pada Juni lalu. Kepala perwakilan PBB di Yangon, Ashok Nigam mengatakan pemerintah memperkirakan ada 22.587 orang terlantar dan 4.665 rumah dibakar dalam pertumpahan darah yang terjadi pada Juni tersebut. 21.700 orang yang kehilangan tempat tinggal adalah warga warga Rohingya yang Muslim.<sup>9</sup>

### Sejarah Etnis Muslim Rohingya

Etnis Rohingya merupakan penduduk minoritas beragama Islam yang bertempat tinggal di daerah Myanmar tepatnya di Provinsi Arakan di sisi sebelah barat laut Myanmar berbatasan dengan Bangladesh, dan sekarang dikenal dengan Provinsi Rakhine atau Rakhaing. Dalam catatan sejarah, wilayah Rakhine atau Rakhaing berada dibawah kekuasaan kerajaan Islam Arakan sejak tahun 1940. Kemudian pada tahun 1732, wilayah ini berhasil direbut dijajah oleh Kerajaan Burma yang dianeksasi oleh Inggris. Diperkirakan bahwa etnis

---

<http://www.merdeka.com/dunia/pemerintah-myanmar-terbukti-diskriminatif-kepada-muslim-rohingya.html>

<sup>9</sup> PBB: 22.000 Orang Terlantar akibat Kerusuhan di Myanmar. <https://id.berita.yahoo.com/pbb-22-000-orang-terlantar-akibat-kerusuhan-di-115212184.html>. Diakses pada 29 Oktober 2014

rohingya adalah keturunan campuran, menelusuri asal usul mereka baik dari luar (Arab, Moor, Turki, Persia, Mogul dan Pathan) Bengali local dan Rakhine. Mereka berbicara versi Chittagonia, dialek regional Bengali yang juga digunakan secara luas diseluruh wilayah bagian tenggara Bangladesh.<sup>10</sup>

*Pertama*, adalah sejarah. Sejarah Myanmar yang dulu disebut Burma, penuh dengan perang dan nyaris tanpa henti. Proses pembentukan Myanmar secara tradisional berlangsung ditengah peperangan antarkelompok. Disamping itu, Myanmar dimasa lalu juga berhadapan dengan invasi dari luar yang dilakukan oleh pasukan Mongol, Cina, dan juga Inggris.

*Kedua*, pada era modern, Myanmar berhadapan dengan kekuatan Imperialis Jepang dan tak pernah luput dari perang saudara. Kondisi perang terus menerus ini membuat konsepsi keamanan nasional dipenuhi dengan beban upaya mempertahankan kesatuan nasional dari ancaman dalam dan luar negeri.

*Ketiga*, adalah geografis. Myanmar dikelilingi oleh lima negara besar dan dua diantaranya adalah negara raksasa, yakni India dan Cina.

*Keempat*, adalah keragaman etnis, budaya, dan agama walaupun didalamnya terdapat satu etnis dominan, Bamar, yang merupakan 69% dari seluruh penduduk Myanmar.

Faktor keempat inilah yang paling banyak menyedot energi politik dan ekonomi pemerintahan pusat. Upaya pemerintah pusat, yang didominasi oleh etnis Burma, untuk

---

<sup>10</sup> Merry Iklimi.2013. *Sikap Bangladesh terhadap program UNHCR "united nations joint initiative" tentang penanganan pengungsi Rohingya (Periode 2006-2011)*. Sarjana Skripsi. Pekanbaru: Universitas Riau

melakukan Burmanisasi kelompok-kelompok etnis yang ada merupakan sumber utama konflik dan instabilitas domestic. Proses asimilasi yang dicanangkan pemerintah pusat mengakibatkan perlawanan fisik dan militer dari etnis-etnis minoritas yang menentang dominasi etnis Bamar.<sup>11</sup>

Sekitar 800 ribu muslim Rohingya dipandang oleh pemerintah dan sebagian besar orang Myanmar sebagai imigran ilegal dari negara tetangga Bangladesh, dan menyebut mereka orang-orang Bengali. Sejumlah kelompok Buddhis beberapa kali melakukan aksi protes menentang keberadaan kelompok muslim tersebut di Myanmar. Rohingya selama ini dianggap PBB sebagai salah satu kelompok minoritas paling teraniaya di dunia.<sup>12</sup>

Badan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (OHCHR) menuding pasukan keamanan Myanmar berada di balik upaya penghapusan entis Muslim Rohingya. OHCHR mendesak dilakukannya penyelidikan khusus dan independen terhadap dugaan upaya genosida Muslim Rohingya, di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Militer yang semestinya menghentikan pertikaian, justru turut andil pada kekerasan terhadap etnis Rohingya. Militer juga telah terlibat melakukan penghasutan pada masyarakat sekitar di Rakhine untuk melakukan penyerangan. Terdapat dugaan yang menunjukkan kewenangan militer telah berubah dengan menjadikan Rohingya sebagai target kekerasan.

<sup>11</sup> Cipto Bambang. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Pustaka Pelajar

<sup>12</sup> Puluhan Tewas Pasca Kerusuhan Terbaru di Rakhine-Rohingya. [http://article.wn.com/view/2012/10/25/Puluhan\\_Tewas\\_Pasca\\_Kerusuhan\\_Terbaru\\_RakhineRohingya/](http://article.wn.com/view/2012/10/25/Puluhan_Tewas_Pasca_Kerusuhan_Terbaru_RakhineRohingya/). Diakses pada 25 Oktober 2014

Pelaksana Tugas Sosial Politik, dan Budaya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Djumara Supriyadi, di Yangon, mengabarkan bahwa tidak kurang dari 700 ribu etnis Muslim Rohingya telah mengungsi akibat kekerasan yang terjadi di Negara myanmar tersebut dan akibat kerusuhan komunal yang menewaskan sekitar 78 orang pada 8-13 Juni lalu di Rakhine.<sup>13</sup>

### **Kekerasan Terhadap Etnis Muslim Rohingya**

Konflik yang terjadi antara monoritas Muslim Rohingya dengan Mayoritas Buddha Arakan telah banyak menyita perhatian publik internasional. Eskalasi konflik yang terjadi dan terus meningkat diantara keduanya memberikan gambaran yang sangat buruk mengenai keseriusan yang ditunjukkan oleh pemerintah Myanmar dalam hal penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia terkait konflik yang terjadi. Konflik ini dipicu oleh insiden pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Ma Thida Htwe, seorang gadis Buddhis Arakan berusia 27 Tahun, yang dilakukan oleh beberapa oknum muslim Rohingya pada Mei 2012. Insiden ini kemudian menjadi salah satu pemicu gejala kebencian terhadap muslim Rohingya diseluruh daerah Arakan. Beberapa hari berselang dari insiden tersebut, masyarakat Buddhis Arakan kembali membalas dengan memukuli dan membunuh 10 orang enis Rohingya didalam suatu pengecatan yang dilakukan oleh Buddhis Arakan.

Insiden pembunuhan tersebut menjadi awal terhadap meningkatnya gejala kekerasan yang terjadi dan

<sup>13</sup><http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/07/29/m7w6dk-muslim-rohingya-dibantai-ohchr-militer-myanmar-terlibat>

pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami oleh muslim Rohingya. Kelompok Buddha Arakan yang didukung oleh biksu Buddha lokal dan aparat keamanan Myanmar melakukan berbagai tindakan kekerasan yang dapat dikatakan dilakukan secara sistematis terhadap muslim Rohingya, mulai dari pemukulan, pemenggalan, pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran tempat tinggal, pengusiran hingga isolasi bantuan ekonomi. Cara-cara ini dilakukan sebagai bentuk cara agar dapat mengusir etnis Rohingya keluar dari Myanmar. Aksi anarkis yang dilakukan oleh masyarakat Buddha ini tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Myanmar, khususnya terhadap perlindungan atas keberlangsungan hidup etnis Rohingya dan penegakan hukum terhadap pelaku aksi-aksi kekerasan. Pemerintah Myanmar dinilai sengaja mengambil kebijakan yang diskriminatif terhadap muslim Rohingya dan adanya dugaan upaya pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar kepada etnis muslim Rohingya.

Warga Rohingya yang berjumlah 800.000 ribu orang di Myanmar dianggap oleh pemerintah sebagai imigran ilegal dari Bangladesh dan banyak warga Myanmar yang menyebut mereka dengan sebutan "Bengali", dan mereka menghadapi diskriminasi yang menyebabkan mereka terasing dari warga Buddha. Lebih dari 22.000 ribu orang yang sebagian merupakan masyarakat Muslim terlantar di Myanmar barat, seluruh permukiman dibakar dalam kerusuhan di Negara Rakhine, yang merusak reformasi Negara tersebut dan menghambat usaha pertolongan di daerah tersebut, tempat dimana

75.000 ribu orang mengungsi di camp penuh sesak setelah bentrokan yang terjadi antara kelompok Buddha dan Muslim pada Juni 2012 lalu. Kepala perwakilan PBB di Yangon, Ashok Nigam, mengatakan pemerintah memperkirakan terdapat 22.587 orang terlantar dan 4.665 rumah dibakar, dan 21.700 orang yang kehilangan tempat tinggalnya adalah warga muslim Rohingya.<sup>14</sup>

Pada 20 Maret 2013 kekerasan juga terjadi di kota Meiktila, yang merupakan salah satu dari kota dari sedikit kota di Burma yang banyak ditempati oleh banyak penduduk Muslim.<sup>15</sup> yang bermula dari pertengkaran di toko emas milik seorang muslim Rohingya saat seorang konsumenn seorang Buddha ingin membeli jepit rambut emas. Pertengkaran harga diantara keduanya berubah menjadi perkelahian dan pemilik toko dilaporkan memukul konsumen Buddha tersebut. Insiden ini kemudian berlanjut dengan pemukulan seorang biksu Buddha yang meninggal dirumah sakit. Berita ini kemudian menyebar dan menimbulkan kekerasan sektarian yang kembali terjadi setelah 2012 lalu. Konflik ini terjadi di kota Meiktila dan tiga kota lainnya di Myanmar<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> PBB: 22.000 Orang Terlantar akibat Kerusuhan di Myanmar. <https://id.berita.yahoo.com/pbb-22-000-orang-terlantar-akibat-kerusuhan-di-115212184.html>. Diakses pada 18 November 2014

<sup>15</sup> Bentrokan Muslim-Buddha kembali pecah di Burma. [http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/03/130321\\_burma\\_kekerasan\\_sektarian](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/03/130321_burma_kekerasan_sektarian). Diakses pada 17 November 2014

<sup>16</sup> Tiga Muslim Burma dihukum 14 tahun penjara. [http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/04/130412\\_burmamuslim](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/04/130412_burmamuslim). Diakses pada 17 November 2014

Pasca kekerasan yang terjadi di kota Meiktila, Burma Tengah telah menyebabkan kota tersebut terlihat seperti telah terjadi bencana alam. Rumah dan gedung sudah rata dengan tanah dan terlihat banyak puing-puing sisa rumah dan gedung, bahkan tembok-tembok rumah yang masih tersisa sangat terlihat lubang-lubang akibat sasaran. Keluarga dan para pemilik toko yang menempati gedung-gedung di Meiktila telah keluar dan angkat kaki dari kota tersebut. Namun para pemulung masih terlihat mengais barang-barang yang kemungkinan masih bias diselamatkan. Komunitas Muslim di Burma yang telah tinggal lama dinegara itu sudah terhapus. Disinilah tempat paling tidak 20 anak laki-laki Muslim diambil dari Madrasah dan dibunuh, mayat mereka disiram dan dibakar. Tulang belulang mereka yang terbakar masih terlihat diantara abu bangunan. Tentara turun kejalan dan jam malam diberlakukan didaerah tersebut. Sepertinnya kebencian terhadap masyarakat muslim Rohingya ini juga disebabkan karena keahlian para orang-orang Muslim, masyarakat Buddha mengatakan orang-orang Muslim bagus dalam sisi bisnis, mereka menguasai transportasi dan konstruksi, dan masyarakat Buddha menganggap mungkin masyarakat Muslim akan mulai mengambil alih partai politik mereka. Kekerasan yang terjadi di Meiktila juga mengejutkan para parlemen daerah. Win Htein seorang parlemen daerah yang mendekam dipenjara selama 20 tahun karena kesetiannya kepada pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi dan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi menyaksikan kekerasan tersebut terjadi. Sebelumnya ia belum pernah menyaksikan kekerasan namun sangat terguncang apa yang telah dilihat dan

disaksikannya di Meiktila. Win Htein melihat delapan anak laki-laki di bunuh di depan nya. Polisi yang berada disana tidak berbuat apapun. Sekitar 30% penduduk Meiktila adalah Muslim. Merka menonjol dalam hal bisnis dan banyak yang memiliki toko. Saat ini sebagian besar dari mereka terpaksa tinggal di kamp-kamp dengan penjagaan ketat dari polisi. Kondisi di kamp juga terlihat sangat kotor. Salah satu pemicu kekerasan adalah Ashin Wirathu, seorang biksu Mandalay berusia 45 tahun. Biksu Ashin Wirathu pernah dipenjara pada tahun 2003 karena memicu kekerasan anti Muslim. Dia dipenjara tahun 2003 karena memicu kekerasan anti Muslim dan dibebaskan tahun lalu sebagai bagian dari amnesti terhadap tahanan. Dia mengorganisir protes pendukung kelompok Buddha dinegara bagian Rakhine, dimana tempat pecahnya sengketa komunal pada Juni lalu. Seperti yang sudah di uraikan diatas sebelumnya, Wirathu menerbitkan sebuah pidato yang berisi “kami Buddha Burma terlalu lunak, kami tidak memiliki jiwa patriotik, meraka orang-orang Muslim bagus dalam sisi bisnis, mereka menguasai transportasi, kontruksi, kini mereka akan mulai mengambil alih partai politik kami”. Dia juga menuduh pria Muslim berulang kali memperkosa wanita Buddha dengan menggunakan kekayaan mereka untuk menggoda.<sup>17</sup>

Kamp pengungsi Rohingya digambarkan sangat mengenaskan. Lebih dari 135.000 ribu orang tinggal di kamp-kamp sementara di Negara bagian Rakhine, sebagian besar adalah pengungsi Rohingya. Ribuan warga

---

<sup>17</sup> Ada apa di balik serangan terhadap Muslim Burma?.  
[http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/04/130404\\_burmamuslim](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/04/130404_burmamuslim). Diakses pada 18 November 2014

Rohingya ini ditampung di tenda yang terletak di seputar saluran pembuangan yang penuh dengan lumpur. Mereka dilarang meninggalkan kamp oleh para petugas yang menghadang penyaluran bantuan. Sementara di kamp untuk kelompok Buddha Rakhine yang terpisah terlihat sangat bersih dan pasok bantuan mengalir dengan teratur. Dua kamp ini terletak di semenanjung Myebon. Para petugas menyebut kamp pengungsi Rohingya sebagai yang paling buruk di Asia.<sup>18</sup>

Terdapat bukti yang mengenai pemerintahan Myanmar yang melakukan diskriminasi terhadap umat Islam Rohingya. Diskriminasi atas warga Rohingya antara lain dengan membatasi pergerakan mereka, dari 12 dokumen pemerintah antara tahun 1993-2013 yang dikaji, ditemukan bahwa pemerintah Myanmar antara lain menerapkan pembatasan perkawinan, kelahiran, perbaikan rumah, maupun pembangunan rumah ibadah. Mereka juga dilarang melakukan perjalanan antar kota atau ke luar dari Negara bagian Rakhine tanpa izin. Pemerintah Myanmar menganggap warga Rohingya yang beragama Islam sebagai kaum pendatang dan bukan sebagai warga Negara namun warga Rohingya merasa bagian dari Myanmar dan mengaku mendapat perlakuan buruk.<sup>19</sup>

Suku Rohingya mengatakan mereka mengalami penindasan etnis dan agama di Myanmar sejak tahun

1990-an. Sementara ini 28.000 ribu pengungsi Rohingya tinggal di dua kamp resmi, sedangkan 200.000 ribu lainnya tinggal di perkampungan tidak resmi. Jika dilihat kondisi pengungsi yang tinggal di kamp resmi relative lebih baik dan mereka mendapat pendidikan, sedangkan mereka yang tinggal di luar lebih miskin dan lebih tidak sehat.<sup>20</sup>

### **Masuknya Office of the High Commissioner For Human Rights**

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa salah satu perhatian Dunia Internasional datang dari sebuah Organisasi Internasional yang bernaung dibawah PBB yaitu *Office of The High Commissioner (OHCHR)*. Konflik yang terjadi di Myanmar dan khususnya kekerasan serta diskriminasi yang dialami oleh muslim Rohingya *Office of The High Commssioner For Human Rights* disini memberi tugas kepada Pelapor Khusus tentang situasi Hak Asasi Manusia di Myanmar, yaitu Yanghee Lee.

Transisi yang penting dan reformasi yang luas di Myanmar harus dipuji. Namun, tanda tanda kemungkinan mundur harus ditangani agar tidak merusak kemajuan yang telah dicapai hingga saat ini. Pelopor khusus memiliki fokus utama dan rekomendasi yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi upaya Myanmar untuk menghormati, melindungi dan memajukan hak asasi manusia dan mencapai demokratisasi, rekonsiliasi dan pembangunan nasional. Mandate pelapor khusus tentang hak asasi manusia di Myanmar didirikan berdasarkan komisi resolusi

<sup>18</sup> PBB terkejut atas kondisi pengungsi Muslim Burma.  
[http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/12/121205\\_burmaamos](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/12/121205_burmaamos). Diakses pada 18 November 2014

<sup>19</sup> Rohingya diduga alami diskriminasi oleh pemerintah Myanmar.  
[http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/02/140225\\_myanmar\\_rohingya](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/02/140225_myanmar_rohingya). Diakses pada 20 Oktober 2014

<sup>20</sup> Nestapa pengungsi suku Rohingya.  
[http://www.bbc.co.uk/indonesia/multimedia/2010/06/100624\\_rohingyaphotos.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/multimedia/2010/06/100624_rohingyaphotos.shtml). Diakses pada 15 November 2014

hak asasi manusia 1992/58 dan baru-baru ini diperpanjang oleh resolusi Dewan HAM 25/26. Laporan ini diajukan sesuai dengan resolusi Dewan 25/26 dan resolusi majelis umum 68/242. Setelah selesainya jangka waktu pemegang mandate sebelumnya, pemegang mandate yang sekarang mengambil fungsinya hanya di Juni 2014. Yang menghasilkan waktu yang lebih singkat dari biasanya untuk melakukan kunjungan Negara dan meninjau informasi yang akan dikumpulkan. Oleh karena itu, laporan ini menetapkan pengamatan awal pelapor khusus, harus dilengkapi dengan pernyataan lisan oleh Majelis Umum. Pada 16 Juni, pelapor khusus bertemu dengan perwakilan tetap Myanmar di Jenewa, dan kemudian bertemu dengan perwakilan Negara anggota lainnya dan entitas PBB di Jenewa. Dari 17 sampai 26 Juli, pelapor khusus melakukan misi pertamanya ke Myanmar. Dia mengungkapkan penghargaannya kepada pemerintah atas kerjasamanya selama kunjungan 10 hari. Dia mengadakan pertemuan di Nay Pyi Taw dan Yangon, dia mengunjungi Mandalay serta Rakhine dan Kachin. Dia mengunjungi Insein, Sittwe, Bhamo dan penjara Myitkina, dimana dia bertemu dengan tahanan politik. Pelapor khusus melakukan komunikasi pada Juni dan Agustus. Pelapor khusus mengakui bahwa pentingnya proses reformasi Myanmar dan menganggap penting untuk terlibat dengan berbagai cabang pemerintahan di semua tingkatan, lembaga legislative dan yudikatif untuk lebih menghargai realitas dilapangan. Demikian pula, di percaya bahwa penting untuk terlibat dengan tokoh masyarakat dan agama, perwakilan masyarakat sipil dan korban pelanggaran hak asasi

manusia. Observasi dan rekomendasinya terfokus pada bagaimana memastikan untuk lebih menghargai prinsi-prinsip hak asasi manusia internasional dan standar di Myanmar. Pelapor khusus akan melanjutkan dialog dengan masyarakat internasional, yang harus tetap terlibat dan terus mendukung Myanmar pada proses reformasi, dan dalam memenuhi kewajiban hak asasi manusia internasional. Dalam memenuhi mandatnya, ia berharap untuk melakukan kunjungan ke Negara-negara tetangga. Dia bermaksud untuk berkolaborasi dengan pemegang mandate prosedur khusus yang lain dan percaya bahwa pemerintah akan mendapat manfaat yang lebih dari keterlibatan dengan mereka. Myanmar akan menjalani siklus kedua dari tinjauan periode secara umum pada Oktober dan November 2015. Pelapor khusus akan mengikuti proses ini dan mendorong pelaksanaan rekomendasi yang diterima dari tinjauan siklus periode secara umum yang pertama pada tahun 2011. Dia juga mengikuti review mendatang di Myanmar dalam konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi dan konvensi hak-hak penyandang cacat. Melihat lingkungan pada pemilu pada tahun 2015 akan menjadi patokan penting dalam melanjutkan transisi demokrasi di Myanmar. Sesuai dengan standart internasional, pemilihan harus transparan, inklusif, partisipatif, bebas dan adil. Untuk itu penting bagi Myanmar untuk mengambil pelajaran dari pemilu umum pada tahun 2010 dan terus melakukan perbaikan dalam proses pemilihan selanjutnya. Kerangka dari hukum pemilu, pelaksanaannya oleh komisi pemilihan serikat pekerja dan instansi terkait lainnya, dan proses menjelang pemilu

(termasuk sehubungan dengan kampanye pemilu dan terkait pendidikan pemilih dan partisipasi) harus dimonitor dan dinilai berdasarkan standar internasional.

Perpindahan minoritas merupakan salah satu indikator sejauh mana hak-hak mereka untuk dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Pada Januari 2014, diperkirakan ada 613.600 pengungsi di Myanmar, hingga 140.000 orang di Negara bagian Rakhine dan 100.000 orang di Negara bagian Kachin. Ada juga sekitar 200.000 pengungsi di timur-selatan, terutama di Mon, Kayin dan Negara bagian Kayah dan wilayah Taninthayri. Sebanyak 120.000 pengungsi tinggal di tempat sementara di sepanjang perbatasan Thailand, beberapa diantaranya telah berada di kamp-kamp selama lebih dari dua dekade. Selama misinya, palapor khusus diberitahu bahwa kondisi masih tidak kondusif bagi kembalinya para pengungsi, seperti masih banyak yang ketakutan mengenai keselamatan dan keamanan mereka untuk akses kembali ke Negara, mata pencaharian, pendidikan dan kesehatan. sementara itu memberikan jaminan untuk mengembalikan secara sukarela, berdasarkan konsultasi dengan mereka yang peduli, dia mengingatkan pemerintah bahwa setiap inisiatif untuk dapat kembali ketempat asal harus dilakukan dengan bebas, individu dan masyarakat sebelum dan terkena dampak, dan dengan actor kemanusiaan.

Diperlukan perlindungan untuk dapat menjamin keamanan mereka ditempat dan mengembalikan martabat mereka, serta reintegrasi mereka dalam masyarakat lokal. Sudah tiga tahun sejak dimulainya kembali konflik di Kachin dan Shan utara, dan bentrokan

yang sedang berlangsung telah mengakibatkan perpindahan atau pengungsian. Catatan palapor khusus, banyak pengungsi internal yang telah tinggal bertahun-tahun di kamp sementara. Beberapa mencatat terhadap kurangnya akses kepada mata pencaharian, dengan banyak anak-anak muda yang lari ke obat-obatan. Dengan demikian, upaya yang lebih besar harus dilakukan dengan cara menginformasikan, melibatkan dan berkonsultasi dengan masyarakat lokal dan atau dengan populasi pengungsi, termasuk tentang kemungkinan pengembalian. Dalam konteks ini, pelapor khusus menyambut baik perkembangan yang terjadi seperti niat yang dinyatakan oleh pemerintah untuk meratifikasi konvensi tentang larangan penggunaan

Mengenai Negara bagian Rakhine, pemerintah harus bertindak:

1. Segera mengatasi masalah kesehatan dalam situasi di kamp-kamp untuk para pengungsi dan lokasi yang terisolasi. Khususnya bagi mereka yang mestinya dilayani, yaitu etnis Rohingya, termasuk dengan peningkatan untuk memberikan pelayanan yang memadai.
2. Menyediakan layanan dasar yang memadai, termasuk di kamp-kamp untuk pengungsi, dan menghapus pembatasan terhadap para Rohingya kebebasan untuk bergerak dan hak-hak lainnya untuk menjamin akses mencari mata pencaharian, makanan, air dan sanitasi serta akses untuk mendapatkan pendidikan.
3. Menyelidiki dan menuntut mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap masyarakat Rohingya.

4. Menghormati Rohingya serta minoritas lainnya terhadap hak identifikasi diri sesuai dengan standar hak asasi manusia yang ada dalam Dunia Internasional.
5. Segera membebaskan anggota staf NGO yang sempat dipenjarakan sehubungan dengan kekerasan yang terjadi pada Juni tahun 2012 lalu.
6. Mengatasi masalah tantangan pembangunan sosial dan ekonomi di Negara bagian Rakhine melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia, memastikan partisipasi masyarakat yang terkena dampak.
7. Mengembangkan langkah-langkah rekonsiliasi sebagai langkah yang diperlukan untuk membangun kembali masyarakat yang terintegrasi untuk dimasukkan kedalam rencana yang akan dilakukan oleh Negara bagian Rakhine.
8. Lebih luas lagi pemerintah juga harus memanfaatkan rencana terhadap tindakan untuk mengembangkan langkah-langkah untuk mengatasi akar penyebab diskriminasi terhadap minoritas ras dan agama, serta ketegangan antar komunal dan kekerasan, mencegah dan menanggapi hasutan kebencian sambil menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diakui secara internasional.<sup>21</sup>

### **Kesimpulan**

Status kewarganegaraan yang tidak dimiliki oleh minoritas etnis Rohingya akan menjadikan mereka semakin tertindas dan akan semakin banyak tindak diskriminasi yang akan mereka alami. Hal ini mendorong

<sup>21</sup> <http://bangkok.ohchr.org/files/A-69-398%20SR%20Myanmar%20Report%20to%20the%20GA%2069th%20Session%202014.pdf>. Diakses pada 28 November 2014

perlunya kebijakan pemerintahan Myanmar untuk segera meratifikasi Undang-Undang kewarganegaraan dan memberikan status kewarganegaraan terhadap etnis muslim Rohingya. Kekerasan dan penyiksaan yang dialami oleh muslim Rohingya memang konflik yang terakumulasi oleh zaman, karena jika dilihat dari asal usulnya muslim Rohingya sudah ada di Negara Myanmar sejak lama.

Konflik yang terjadi antara Buddha Arakan dan muslim Rohingya di Myanmar ini memang harus mendapat perhatian dan kesadaran langsung dari pemerintah Myanmar, karena jika tidak akan semakin banyak muslim Rohingya yang melarikan diri dari Negara mereka untuk mencari perlindungan ke Negara tetangga, semakin banyak kekerasan yang terjadi, semakin banyak pengungsi, dan semakin banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi.

Dengan masuknya pelapor khusus yang dikirimkan oleh Office Of The High Commissioner For Human Rights (OHCHR) semoga keinginan yang disampaikan kepada pemerintah Myanmar dapat didengar. Masuknya OHCHR juga memberikan bantuan kepada muslim Rohingya di Myanmar, selain itu juga melakukan komunikasi dengan pemerintah Myanmar agar memberikan akses masuk kepada Badan Internasional lain untuk memberikan bantuan kepada muslim Rohingya. Bagaimanapun kekerasan yang terjadi sudah cukup lama terhadap etnis Rohingya ini harus segera di hentikan

### **DAFTAR PUSTAKA**

Cipto Bambang. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Pustaka Pelajar

- Dinamika Politik dan Demokrasi Myanmar.  
<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/4s1hubunganinternasional/206613027/BAB%20II.pdf>. Diakses pada 10 November 2014
- Naypyitaw Antara News. Naypyitaw, Ibu Kota Myanmar yang senyap.  
<http://www.antaranews.com/berita/410553/naypyitaw-ibu-kota-myanmar-yang-senyap>. Diakses pada 11 November 2014
- [lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135851-T%2028013-Kajian%20mengenai-Pendahuluan.pdf](http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135851-T%2028013-Kajian%20mengenai-Pendahuluan.pdf). Diakses pada 10 November 2014
- CIA The World Factbook. Burma.  
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html> (tanggal 14/02/2013)
- Op Cit. Merry Iklima  
<http://www.dw.de/puluhan-tewas-pasca-kerusuhan-terbaru-rakhine-rohingya/a-16330343>. Diakses pada 25 Oktober 2014
- Pemerintah Myanmar terbukti diskriminatif terhadap muslim rohingya. Merdeka.com  
<http://www.merdeka.com/dunia/pemerintah-myanmar-terbukti-diskriminatif-kepada-muslim-rohingya.html>
- PBB: 22.000 Orang Terlantar akibat Kerusuhan di Myanmar.  
<https://id.berita.yahoo.com/pbb-22-000-orang-terlantar-akibat-kerusuhan-di-115212184.html>. Diakses pada 29 Oktober 2014
- Merry Iklimi.2013. *Sikap Bangladesh terhadap program UNHCR "united nations joint initiative" tentang penanganan pengungsi Rohingya (Periode 2006-2011)*. Sarjana Skripsi. Pekanbaru: Universitas Riau
- Puluhan Tewas Pasca Kerusuhan Terbaru di Rakhine-Rohingya.  
[http://article.wn.com/view/2012/10/25/Puluhan\\_Tewas\\_Pasca\\_Kerusuhan\\_Terbaru\\_RakhineRohingya/](http://article.wn.com/view/2012/10/25/Puluhan_Tewas_Pasca_Kerusuhan_Terbaru_RakhineRohingya/). Diakses pada 25 Oktober 2014
- <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/07/29/m7w6dk-muslim-rohingya-dibantai-ohchr-militer-myanmar-terlibat>
- PBB: 22.000 Orang Terlantar akibat Kerusuhan di Myanmar.  
<https://id.berita.yahoo.com/pbb-22-000-orang-terlantar-akibat-kerusuhan-di-115212184.html>. Diakses pada 18 November 2014
- Bentrok Muslim-Buddha kembali pecah di Burma.  
[http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/03/130321\\_burma\\_kekerasan\\_sektarian](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/03/130321_burma_kekerasan_sektarian). Diakses pada 17 November 2014
- Tiga Muslim Burma dihukum 14 tahun penjara.  
[http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/04/130412\\_burmamuslim](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/04/130412_burmamuslim). Diakses pada 17 November 2014
- Ada apa di balik serangan terhadap Muslim Burma?  
[http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/04/130404\\_burmamuslim](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/04/130404_burmamuslim). Diakses pada 18 November 2014
- PBB terkejut atas kondisi pengungsi Muslim Burma.  
[http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/12/121205\\_burmaamos](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/12/121205_burmaamos). Diakses pada 18 November 2014

Rohingya diduga alami diskriminasi oleh pemerintah Myanmar. [http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/02/140225\\_myanmar\\_rohingya](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/02/140225_myanmar_rohingya). Diakses pada 20 Oktober 2014

Nestapa pengungsi suku Rohingya. [http://www.bbc.co.uk/indonesia/multimedia/2010/06/100624\\_rohingyaphotos.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/multimedia/2010/06/100624_rohingyaphotos.shtml). Diakses pada 15 November 2014

<http://bangkok.ohchr.org/files/A-69-398%20SR%20Myanmar%20Report%20to%20the%20GA%2069th%20Session%202014.pdf>. Diakses pada 28 November 2014